



Dorong Penyusunan LPPD Secara Benar

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong jajarannya menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara benar demi pencapaian kinerja yang baik.

"Meskipun kinerja pemerintah daerah sudah baik, namun bila terdapat miskomunikasi dalam kelengkapan dokumen kaitan dengan LPPD, maka hal itu akan berdampak pada anjloknya nilai yang diraih," ujar Edi di sela-sela pembahasan LPPD

di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (25/1).

Edi menyatakan, proses penyusunan LPPD harus dilakukan maksimal agar hasil akhir yang ditargetkan bisa tercapai. "Untuk itu kita berharap LPPD 2016 ini jauh lebih

baik sehingga bisa seimbang antara keberhasilan kinerja dengan laporan yang disusun," tegasnya.

Ia menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menguasai dasar dan teknis dalam penyusunan LPPD. Ia berharap, penyusunan LPPD bisa akurat.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar Arman Sahri mengatakan, kinerja Pemkot Pontianak relatif memuaskan.

Namun, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan agar menunjukkan kinerja yang lebih baik. "Masih ditemukan pembuktian dari laporan yang belum disampaikan," ujarnya.

Dalam penyampaian LPPD ini, lanjutnya, penyusun harus mampu memperlihatkan keberhasilan Pemkot Pontianak dari sisi inovasi dan program yang dijalankan.

"Terlebih sebagai Laboratorium Inovasi dalam tata kelola pemerintahan, Kota Pontianak seringkali menjadi lokasi studi banding bagi sejumlah daerah di Indonesia terkait perkembangannya dan kemajuannya," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Pontianak Herri Mustamin me-

nilai, indikator yang diraih berupa predikat Wajdat Tanpa Pengucualian (WTP) masih memiliki beberapa indikator perbaikan yang harus dipenuhi. Diakuinya, dari sisi kinerja serta laproan keuangan yang disampaikan sudah berkategori baik.

"Meskipun meraih predikat WTP, tidak menutup kemungkinan masih perlu ada perbaikan. Adanya perbaikan ini tentunya berdampak pada norma yang harus dipatuhi. Harus terus dikawal dan kita mendukung saran tersebut," ujar Herri.

Menurut Herri, hal-hal sekecil apapun mengenai keuangan harus dipertanggungjawabkan. "Dari sisi akuntabilitas dan yang paling penting bahwa hasil belanja satu peser pun itu harus bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

Ia berharap, laporan yang disajikan tak hanya menekankan pada sisi akuntansi, namun juga substansi. "Pergunaan anggaran daerah harus mengena serta dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Tingkat penganjuran masih tinggi dan adanya masyarakat golongan tidak mampu. Jadi setidaknya harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan," pungkasnya. (gky)